

Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018

Harianto ^{1,*}  Wawan Budi Darmawan ²  dan Muradi ³ 

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

² Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

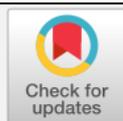
³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

* Korespondensi: harianto18001@mail.unpad.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Harianto, H., Darmawan, W. B., & Muradi, M. (2020). *The Winning of Empty Box in the 2018 Makassar Regional Head Election*. *Society*, 8(2), 546-556.

DOI: [10.33019/society.v8i2.203](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.203)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 27 Juni, 2020;

Diterima: 21 Oktober, 2020;

Dipublikasi: 22 Desember, 2020;

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana kotak kosong menang pada Pilkada Makassar 2018. Fenomena ini menjadi sejarah pemilu dimana satu kandidat gagal memenangkan pemilu. Sepuluh partai politik yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), mempromosikan pasangan calon tunggal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pergerakan relawan kotak kosong dalam Pilkada Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik snowball sampling, dan menggunakan teori pergerakan sosial. Ada tiga bagian teori ini: 1) Teori keluhan. Kekecewaan publik atas diskualifikasi pasangan calon dan menganggap penyelenggara pemilu tidak adil; 2) Teori struktur mobilisasi. Menganalisis pergerakan relawan kotak kosong untuk menghimpun dukungan massa dan simpatisan selama pemilihan; dan 3) Teori framing. Analisis isu yang digunakan dan metode untuk menyebarkan isu. Hasil penelitian menemukan bahwa fenomena kotak kosong pada Pilkada Makassar, berbeda dengan pilkada di daerah lain yang pasangan calon tunggal tidak memiliki lawan, di Makassar salah satu pasangan calon didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran. Hal itu membuat masyarakat,

pendukung, dan tim sukses kecewa dengan keputusan KPU. Kekecewaan ini juga mengakibatkan munculnya gerakan relawan kotak kosong. Gerakan relawan kotak kosong menghimpun dukungan massa dan simpatisan melalui sosialisasi dari pintu ke pintu, leaflet, flyer, dan spanduk ajakan bertindak untuk memenangkan kotak kosong dan menggunakan media sosial dan media online sebagai alat kampanye.

Kata Kunci: Gerakan Sosial; Kotak Kosong; Pasangan Calon Tunggal; Pilkada Serentak; Relawan

1. Pendahuluan

Pemilihan umum atau pemilu, menurut India Samego, disebut juga “*Political Marketing*”. Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/komunitas berinteraksi untuk melaksanakan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian kegiatan politik (Rahman, 2007).

Sistem pemilihan umum merupakan salah satu sistem bagi masyarakat untuk memilih wakilnya. Pada pemilihan umum legislatif, sistem pemilihan mengalihkan jumlah suara menjadi jumlah kursi di lembaga legislatif, sedangkan dalam pemilihan presiden, gubernur, dan bupati/walikota, jumlah suara yang diperoleh merupakan penentu kemenangan dalam pemilu (Gaffar, 2006).

Pilkada serentak merupakan salah satu perkembangan pemilihan umum di Indonesia. Salah satu tujuan pilkada serentak adalah menghemat anggaran negara. Pilkada serentak telah berjalan selama tiga periode sejak tahun 2015, 2017, dan 2018. Pilkada serentak melahirkan istilah baru; satu pasangan calon bersaing dengan kotak kosong. Pada Pilkada serentak 2015, istilah kotak kosong belum muncul. Jika ada pasangan calon tunggal, pada surat suara hanya akan ditampilkan pilihan setuju dan tidak setuju di bagian bawah gambar pasangan calon tunggal (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015). Baru kemudian, pada pilkada serentak berikutnya pada tahun 2017 dan 2018, surat suara menampilkan gambar pasangan calon tunggal berdampingan dengan kotak kosong (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2017).

Pada Pilkada serentak tahun 2015, yang terdiri dari pemilihan gubernur, pemilihan walikota, dan pemilihan bupati, meliputi 269 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten (Dirgantara, 2015; Suara.com, 2015). Pilkada serentak tahun 2017 meliputi 101 daerah yang terdiri dari 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten (Widyasari et al., 2019; Liputan6.com, 2016). Pada Pilkada serentak tahun 2015, terdapat tiga daerah dengan pasangan calon tunggal, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara (CNN Indonesia, 2015).

Kemudian pada Pilkada serentak 2017, terdapat sembilan daerah dengan pasangan calon tunggal, antara lain Kabupaten Pati (Darmawan, 2017), Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Tambrau, Kota Jayapura, dan Sorong. Kota (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2016). Sedangkan pada Pilkada serentak 2018 meliputi 171 daerah dan 16 diantaranya dengan pasangan calon tunggal.

Tabel 1. Jumlah Daerah dan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2018

No	Kategori Daerah	Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah		Jumlah Daerah
		2018	2019	
1	Provinsi	12	5	17
2	Kabupaten	78	37	115
3	Kota	29	10	39
Jumlah Daerah		119	52	171

Sumber: Detik.com (2017)

Berdasarkan **Tabel 1**, jumlah daerah pada Pilkada serentak 2018 adalah 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Tabel 2. Jumlah Daerah Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2018

No	Nama Daerah	Kategori Daerah
1	Deli Serdang	Kabupaten
2	Padang Lawas Utara	Kabupaten
3	Prabumulih	Municipality
4	Pasuruan	Kabupaten
5	Tangerang	Municipality
6	Tangerang	Kabupaten
7	Lebak	Kabupaten
8	Tapin	Kabupaten
9	Minahasa Tenggara	Kabupaten
10	Enrekang	Kabupaten
11	Makassar	Municipality
12	Mamasa	Kabupaten
13	Mamberamo Tengah	Kabupaten
14	Puncak	Kabupaten
15	Jayawijaya	Kabupaten
16	Bone	Kabupaten

Sumber: Liputan6.com (2018b)

Tabel 2 menunjukkan 16 daerah dengan pasangan calon tunggal pada Pilkada serentak 2018 kategori kabupaten/kota. Pasangan calon tunggal dalam Pilkada serentak terjadi pada

Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018. Namun, baru pada Pilkada serentak 2018, kotak kosong menang melawan pasangan calon tunggal. Kemenangan kotak kosong telah menjadi catatan sejarah dalam pemilu Indonesia, di mana pasangan calon tunggal kalah melawan kotak kosong untuk pertama kalinya. Menarik untuk diteliti bahwa kotak kosong tersebut hanya berupa gambar persegi panjang dan telah berhasil menang.

Pasangan calon tunggal dalam Pilkada Makassar 2018, Munafri Arifuddin berpasangan dengan Andi Rachmatika Dewi, atau yang lebih dikenal dengan Appi-Cicu, didukung sepuluh partai politik, yakni Golkar, NasDem, PDI-P, PPP, PBB, Gerindra, PKS, Hanura, PAN, dan PKPI (Kompas, 2018a). Munafri Arifuddin merupakan menantu Aksa Mahmud, pemilik Grup Bosowa. Aksa Mahmud adalah saudara ipar Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI dalam 2 periode, 2004–2009 dan 2014–2019 (Kompas.com, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pertama, faktor penyebab satu pasangan calon atau kotak kosong adalah batalnya dukungan dari PKPI untuk mengeluarkan rekomendasi dua pasangan calon (Mara, 2018). Kedua, fokus pada partisipasi publik dalam pemilu: *electoral activity*, *lobbying*, *organizational activity*, *contact*, dan *violence*, serta upaya memenangkan kotak kosong (Khaerah et al., 2019). Ketiga, fokus pada kemunculan pasangan calon tunggal atau kotak kosong, tetapi ada perbedaan. Penelitian ini menemukan tiga faktor yaitu Faktor Institusional, Faktor Partai Politik, dan Egoisme Kekuasaan (Damanik, 2018).

Posisi penelitian saat ini adalah untuk memperluas dan memperkaya literatur dari penelitian sebelumnya. Tiga penelitian sebelumnya hampir memiliki kemiripan dengan penelitian ini, namun yang berbeda dengan penelitian ini adalah mengamati gerakan sosial warga Makassar dalam memenangkan kotak kosong.

Kelompok relawan pemenangan kotak kosong Pilkada Makassar terdiri dari beberapa kelompok di setiap tingkat. Kelompok relawan “Salamander” dengan cakupan wilayah di tingkat rukun tetangga (RT). Kelompok relawan “Hunter” dengan cakupan wilayah di tingkat rukun warga (RW). Kelompok relawan “Bombardir” dengan cakupan wilayah di tingkat kelurahan. Kelompok relawan “Terminator” dengan cakupan wilayah di tingkat kecamatan. Kelompok relawan “Komodor” dan dengan cakupan wilayah di tingkat kota.

Kemenangan kotak kosong melawan satu pasangan calon tunggal dalam pemilihan umum merupakan fenomena sejarah dan merupakan yang pertama dan satu-satunya sampai saat ini di Indonesia (Detik.com, 2018). Gerakan relawan untuk memenangkan kotak kosong pada Pilkada Makassar 2018 berbeda dengan pilkada lainnya. Menarik untuk mengkaji gerakan sosial yang terjadi pasca diskualifikasi pasangan calon.

Penelitian ini membahas bagaimana kotak kosong menang pada Pilkada Makassar 2018 dan mendeskripsikan gerakan relawan dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan massa dan simpatisan dalam memenangkan kotak kosong pada Pilkada Makassar 2018.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Keluhan

Sidney Tarrow dan beberapa akademisi gerakan sosial lainnya memodifikasi konsep eksploitasi kelas Marx menjadi teori keluhan untuk menganalisis gerakan sosial dan bentuk perlawanan politik lainnya. Lebih lanjut, Alberto Melucci berpendapat bahwa suatu gerakan terbentuk sebagai reaksi atas keluhan baru (Sukmana, 2016).

2.2. Teori Struktur Mobilisasi

Tentu saja, teori keluhan dan struktur mobilisasi berakar pada jaringan sosial, di mana massa dan sukarelawan direkrut dan dimobilisasi. McAdam *et al.* (1996) mendefinisikan struktur mobilisasi sebagai “*mobilizing structures we mean those collective vehicles, informal as well as formal, through which people mobilize and engage in collective action*”. Struktur mobilisasi adalah aksi kolektif yang dilakukan secara formal dan informal untuk menggerakkan orang-orang yang terlibat dalam aksi kolektif dalam gerakan sosial.

2.3. Teori Framing

Dalam gerakan sosial, *framing* (pembingkai) melengkapi teori peluang politik (*political opportunities*) dan struktur mobilisasi (*mobilizing structures*). Zald berpendapat bahwa ketegangan dan kontradiksi budaya menciptakan keluhan dan mobilisasi ke dalam proses pembingkai (*framing process*). *Framing* juga merupakan strategi untuk mencapai tujuan gerakan sosial. Tentu saja *framing* membutuhkan media. Para pelaku gerakan sosial perlu membingkai aksi-aksi tersebut dengan slogan dan bahasa untuk merangsang emosi dan memobilisasi massa dan relawannya. *Framing* sangat penting untuk menyampaikan pesan untuk memobilisasi massa dan relawan dan mendapatkan dukungan mereka (Situmorang, 2007).

Ketiga teori di atas cocok untuk mengkaji fenomena di Pilkada Makassar 2018. Teori keluhan mengkaji bagaimana kekecewaan masyarakat akibat diskualifikasi salah satu pasangan calon sehingga masyarakat merasa dicurangi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Massa pendukung dan simpatisan pasangan calon yang didiskualifikasi berubah menjadi relawan kotak kosong, dan masyarakat yang kecewa lebih memilih kotak kosong ketimbang pasangan calon tunggal.

Teori struktur mobilisasi mengkaji bagaimana sukarelawan kotak kosong ini mengumpulkan massa dan simpatisan dalam memenangkan kotak kosong. Gerakan para relawan mengumpulkan massa dan simpatisan secara door-to-door untuk mendapatkan dukungan masyarakat lokal di Makassar. Teori *framing* mengkaji bagaimana sukarelawan kotak kosong menciptakan isu dan bagaimana penyebaran isu tersebut. Dalam hal ini, relawan kotak kosong menggunakan isu “Memilih Kotak Kosong Adalah Sah” dan *tagline* “Jangan Biarkan Makassar Mundur Lagi”.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Creswell, 2013). Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang terjadi atau sedang berkembang, bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena kemenangan kotak kosong dan pergerakan relawannya pada Pilkada Makassar 2018. Informan dalam penelitian ini adalah relawan kotak kosong. Pemilihan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah empat orang relawan kotak kosong. Setiap relawan merupakan anggota dari empat kelompok relawan dengan tingkat cakupan yang berbeda. Kelompok relawan “Salamander” dengan cakupan wilayah di tingkat rukun tetangga (RT). Kelompok relawan “Hunter” dengan cakupan wilayah di tingkat rukun warga (RW). Kelompok relawan “Bombardir” dengan cakupan wilayah di tingkat kelurahan. Kelompok relawan “Terminator” dengan cakupan wilayah di tingkat kecamatan. Kelompok relawan “Komodor” dan dengan cakupan wilayah di tingkat kota.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, media *online*, dan studi pustaka kemudian menganalisis data dalam beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi (Moleong, 2005).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Munculnya Relawan Kotak Kosong

Fenomena pasangan calon tunggal melawan kotak kosong di Indonesia bukanlah hal baru di Pilkada serentak 2018. Pasangan calon tunggal pertama muncul pada Pilkada serentak 2015. Namun, saat itu, pada surat suara hanya akan ditampilkan pilihan setuju dan tidak setuju di bagian bawah gambar pasangan calon tunggal (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015). Baru kemudian, pada pilkada serentak berikutnya pada 2017 dan 2018, surat suara menampilkan gambar pasangan calon tunggal berdampingan dengan kotak kosong (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2017).

Pilkada serentak 2018 berbeda dengan dua pilkada serentak sebelumnya. Bedanya, kotak kosong pada pemilu serentak sebelumnya tidak pernah menang melawan satu pasangan calon. Sedangkan pada Pilkada serentak 2018 di Makassar, kotak kosong menang melawan pasangan calon tunggal. Munculnya kotak kosong dalam Pilkada Makassar tentu memiliki dinamika tersendiri.

Awal mula munculnya kotak kosong di Pilkada Makassar memang menarik. Pilkada Makassar memiliki dua pasangan calon: pasangan calon pertama, Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi dengan singkatan Appi-Cicu, dan pasangan calon kedua, Mohammad Ramdhan Pomanto - Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, dengan singkatan Danny-Indira atau DIAMI (Kompas, 2018a).

Pasangan calon pertama, Munafri Arifuddin, merupakan CEO PSM Makassar dan juga menantu Aksa Mahmud, pemilik Grup Bosowa. Aksa Mahmud merupakan adik ipar Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, dalam 2 periode, 2004–2009 dan 2014–2019 (Kompas.com, 2017), serta pasangannya, Andi Rachmatika Dewi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (TRIBUNnews, 2018a). Sedangkan pasangan calon kedua, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto, adalah petahana, sedangkan pasangannya, Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, merupakan anggota DPRD Kota Makassar (Liputan6.com, 2018a).

Danny-Indira mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah kota Makassar melalui jalur perseorangan atau independen dengan menggalang dukungan dari warga Makassar menggunakan fotokopi KTP. Appi-Cicu mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah kota Makassar melalui partai politik. Partai politik pendukung pasangan calon Appi-Cicu terdiri dari Golkar, NasDem, PDI-P, PPP, PBB, Gerindra, PKS, Hanura, PAN, dan PKPI. Banyaknya dukungan partai politik terhadap pasangan calon Appi-Cicu membuat pasangan calon Danny-Indira mencalonkan diri melalui jalur perseorangan atau independen. Partai yang tersisa tidak memiliki kursi yang cukup untuk mendukung pasangan calon. KPU Kota Makassar menetapkan pasangan calon melalui rapat pleno terbuka pada 12 Februari 2020, di Kantor KPU Kota Makassar (Kompas, 2018a).

Pengundian nomor resmi kedua calon berlangsung di Grand Clarion Hotel Makassar pada 13 Februari 2020. Pasangan Appi-Cicu mendapat nomor resmi 1, sedangkan pasangan Danny-Indira mendapat nomor resmi 2. Namun demikian. Beberapa hari kemudian, tim kuasa hukum pasangan Appi-Cicu mengajukan gugatan terhadap pasangan calon Danny-Indira ke Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar. Gugatan tersebut berisi pelanggaran yang dilakukan oleh Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai petahana (*incumbent*). Gugatan tim hukum Appi-Cicu

terkait dengan kebijakan petahana yang melanggar aturan pilkada untuk pencalonan. Tiga kebijakan melanggar aturan; pertama, pembagian ponsel ke seluruh ketua RT/RW di kota Makassar. Kedua, pengangkatan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Ketiga, *tagline* Pemkot Makassar “2X+Baik” sebagai *tagline* kampanye Pilkada (TRIBUNnews, 2018b).

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Makassar, pasangan calon Danny-Indira didiskualifikasi dari pencalonan karena secara sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 3 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017 Pasal 89 Ayat 2 (TRIBUNnews, 2018b).

Diskualifikasi incumbent telah menyebabkan munculnya kotak kosong dan pendukungnya yang disebut Relawan Kotak Kosong. Pendukung Mohammad Ramdhan Pomanto berubah menjadi relawan kotak kosong. Warga Makassar kecewa dengan proses diskualifikasi yang menguntungkan satu pasangan calon (Appi-Cicu).

Kekecewaan dan harga diri menjadi pendorong yang kuat bagi masyarakat Makassar untuk memenangkan kotak kosong dalam Pilkada Makassar. Kekecewaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang tidak adil membuat relawan kotak kosong bekerja keras untuk membuktikan bahwa kotak kosong bisa menang dan menjadi sejarah pertama di Indonesia di mana kotak kosong menang melawan satu pasangan calon dalam pemilu. Harga diri juga menjadi salah satu alasan relawan untuk memenangkan kotak kosong. Pendukung Danny-Indira dipermalukan seluruhnya oleh para pendukung Appi-Cicu yang mengejek dengan kata-kata yang menghina karena pasangan calonnya didiskualifikasi. Oleh karena itu, sebagai suku Bugis-Makassar yang mengedepankan budaya *Siri'* (harga diri) (Abdullah, 1985), harus menjaga martabatnya dengan mendukung kotak kosong dan memenangkan pemilu.

4.2. Gerakan Relawan Kotak Kosong

Munculnya gerakan relawan kotak kosong sebagai respon atas keluhan kekecewaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang tidak adil. Relawan kotak kosong bergerak secara masif dan terstruktur. Relawan ini bekerja di akar rumput untuk mencari dukungan massa untuk memilih kotak kosong. Mobilisasi massal oleh relawan kotak kosong dimulai dari sosialisasi *door-to-door* hingga pengembangan jaringan organisasi sebagai sayap organisasi.

Salah satu gerakan relawan kotak kosong untuk mengumpulkan massa pendukung dan simpatisan secara masif adalah melalui sosialisasi dari pintu ke pintu (*door-to-door*). Masyarakat Makassar tetap menginginkan Mohammad Ramdhan Pomanto menjadi Walikota Makassar karena kinerja dan pencapaiannya selama menjabat, seperti lorong *garden*, pariwisata, kebersihan kota, prestasi Adipura, dan program lainnya. Kinerja dan pencapaiannya tersebut telah memotivasi masyarakat Makassar untuk mendukung kotak kosong dalam Pilkada Makassar sehingga perlu dilakukan pemilihan ulang untuk tahun 2020. Selain itu, relawan kotak kosong mendekati organisasi lokal sebagai sayap relawan kotak kosong untuk mendukung kotak kosong di pilkada kota Makassar.

Organisasi lokal yang ada di kota Makassar antara lain Laskar Jeneponto, Komunitas Pemuda Utara, Komunitas Turikale, Laskar Karuwisi, Komunitas Massenrengpulu, dan organisasi lainnya. Pendekatan organisasi lokal membuat kekuatan relawan kotak kosong semakin kuat dan masif di lapangan untuk mencari dukungan massa dan simpatisan.

Isu-isu muncul terkait kotak kosong yang ditunggangi oleh para politisi. Menurut Arwan, Koordinator Relawan Kotak Kosong “Terminator” Kecamatan Manggala, gerakan mereka tidak ditunggangi politisi dan digerakkan atas dasar kekecewaan dan harga diri. Itu adalah upaya

para relawan memenangkan kotak kosong dalam Pilkada Makassar. Di luar relawan, gerakan politik lain menginginkan kotak kosong untuk menang.

Harga diri, sebagai salah satu pemicu yang membuat relawan kotak kosong bekerja keras untuk mengumpulkan massa dan pendukung dalam memenangkan kotak kosong tersebut. Sebagian besar pendukung pasangan calon yang didiskualifikasi, selain merasa kecewa, juga merasa malu dengan ejekan pendukung pasangan calon lainnya.

Suku Bugis-Makassar sangat menjunjung tinggi budaya *Siri'* (harga diri) (Abdullah, 1985). Mereka malu jika dipermalukan tapi tidak melawan. Oleh karena itu, salah satu opsi untuk melawan adalah dengan menjadi kotak kosong pendukung dan mengalahkan pasangan calon tunggal dalam Pilkada Makassar. Mereka menggunakan modal jejaring sosial untuk menggalang massa dan mendapatkan dukungan.

Penggunaan jejaring sosial relawan kotak kosong bertujuan untuk menambah massa dan simpatisan. Gerakan itu juga berhasil, sesuai keinginan rakyat. Selain mengumpulkan massa dan simpatisan secara *door-to-door* dan pendekatan kepada organisasi daerah, relawan kotak kosong juga berkampanye dengan berbagai cara, seperti memasang spanduk di lorong, tembok, dan pagar rumah warga. Spanduk tersebut berisi pesan "Memilih Kotak Kosong adalah Sah", diikuti dengan tagar "Lawan Pembegal Demokrasi".

Relawan kotak kosong juga melakukan aksi di jalan protokol dan membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Aksi tersebut dilakukan dengan tema "Selamatkan Suara Rakyat Makassar dan Menangkan Kotak Kosong". Isi selebaran yang dibagikan berisi "Pilih Kotak Kosong dan Mengapa Harus Kotak Kosong". Hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh relawan kotak kosong diliput di media *online* dan media sosial. Promosi isu publik melalui media telah meningkatkan pendukung kotak kosong. Seruan memenangkan kotak kosong dengan *hashtag* "Jangan Biarkan Makassar Mundur Lagi" masif di postingan media sosial.

Perjuangan para relawan kotak kosong telah membuahkan hasil dimana kotak kosong menang melawan satu pasangan calon tunggal. Total suara pada Pilkada Makassar 2018 sebanyak 565.040 suara. Kotak kosong memperoleh 300.795 suara (53,23%), sedangkan pasangan Appi-Cicu memperoleh 262.245 suara (46,77%), dengan selisih 36.898 suara. Dalam rekapitulasi suara, kotak kosong menang di 13 Kecamatan di kota Makassar. Sedangkan pasangan calon tunggal, Appi-Cicu, hanya menang di 2 kecamatan (Kompas, 2018b). Pada Pilkada Makassar 2018, Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.019.475 pemilih, 497.386 (49%) adalah pemilih laki-laki, dan 522.089 (51%) adalah pemilih perempuan (Rakyatku.com, 2018). Kotak kosong resmi memenangkan Pilkada Makassar 2018, akibatnya lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan pemilihan ulang pada tahun 2020.

5. Kesimpulan

Diskualifikasi salah satu pasangan calon, Mohammad Ramdhan Pomanto - Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, menyebabkan Pilkada Makassar 2018 hanya menyisakan satu pasangan calon Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi. Diskualifikasi salah satu pasangan calon menyebabkan masyarakat Makassar kecewa dan menilai penyelenggara pemilu tidak adil. Kekecewaan atau keluhan ini memicu gerakan perlawanan politik. Mereka membentuk kelompok gerakan akar rumput secara masif yang disebut relawan kotak kosong, dengan tujuan memenangkan kotak kosong pada Pilkada Makassar tahun 2018. Dengan demikian, lembaga penyelenggara pemilu harus menggelar pemilu ulang pada tahun 2020.

Relawan kotak kosong juga melakukan kampanye secara masif melalui media *online* dan media sosial. Salah satunya adalah ajakan memenangkan kotak kosong melalui grup Facebook dengan salah satu tagar, "Jangan Biarkan Makassar Mundur Lagi". Gerakan yang dilakukan

oleh relawan kotak kosong ini berhasil dan menorehkan sejarah untuk pertama kalinya dimana kotak kosong menang melawan satu pasangan calon tunggal.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan, terutama kepada Universitas Padjadjaran dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas dukungannya dalam penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. (1985). *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta, Indonesia: Inti Idayu Press.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2015, October 21). KPU Tetapkan Model Surat Suara Calon Tunggal Bergambar. Retrieved from <https://bawaslu.go.id/id/berita/kpu-tetapkan-model-surat-suara-calon-tunggal-bergambar>
- CNN Indonesia. (2015, December 10). Pilkada Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133536-32-97294/pilkada-tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar>
- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Damanik, E. L. (2018). Pemilihan Tanpa Kontestasi: Kotak Kosong Versus Kandidat Tunggal pada Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Deli Serdang. *Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2018: "Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan dan Social Studies Di Era Revolusi Industri 4.0,"* 507-511. Medan, Indonesia. Retrieved from <http://digilib.unimed.ac.id/35857/>
- Darmawan, I. (2017). Peran Dan Strategi Kelompok "Kotak Kosong" Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 45-51. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11382>
- Detik.com. (2017, April 20). Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>
- Detik.com. (2018, December 27). Pertama di Indonesia! Kotak Kosong Menang Pilkada. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4360870/pertama-di-indonesia-kotak-kosong-menang-pilkada>
- Dirgantara, I. (2015, August 1). Simultaneous regional head elections in Indonesia 2015 - Ifimes. Retrieved from <https://www.ifimes.org/en/9052>
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Khaerah, N., Junaedi, J., & Muslimin, M. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Diskursus Kolom Kosong Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 16-23. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.497>

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2016, October 6). Pasca Perpanjangan Pendaftaran, 9 daerah Paslon Tunggal, total Pendaftar menjadi 337 Paslon. Retrieved from <https://pilkada2017.kpu.go.id/berita/detail/27>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2017, September 11). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250. Retrieved from https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/9%20Tahun%202017.pdf
- Kompas.com. (2017, October 28). Golkar Usung Keponakan Jusuf Kalla di Pilkada Makassar. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2017/10/28/19240091/golkar-usung-keponakan-jusuf-kalla-di-pilkada-makassar>
- Kompas.com. (2018a, February 12). Dua Paslon Pilkada Makassar Ditetapkan, tetapi Tidak Ada Kandidat yang Hadir. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/20120521/dua-paslon-pilkada-makassar-ditetapkan-tetapi-tidak-ada-kandidat-yang-hadir>
- Kompas.com. (2018b, July 7). KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018 Halaman all - Kompas.com. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018?page=all>
- Liputan6.com. (2016, February 15). Ini 101 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2017. Retrieved from <https://www.liputan6.com/pilkada/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>
- Liputan6.com. (2018a, January 13). 2 Srikandi Cantik Nasdem Bertarung di Pilkada Makassar 2018. Retrieved from <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3222507/2-srikandi-cantik-nasdem-bertarung-di-pilkada-makassar-2018>
- Liputan6.com. (2018b, June 30). KPU: Kotak Kosong Berpeluang Menang Pilkada di 16 Daerah. Retrieved from <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3572513/kpu-kotak-kosong-berpeluang-menang-pilkada-di-16-daerah>
- Mara, S. (2018). DEMOKRASI KOTAK KOSONG (Studi Kasus Pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2017). *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 54-64. <https://doi.org/10.36412/ce.v2i1.443>
- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (Eds.). (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings (Cambridge Studies in Comparative Politics)*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, A. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Rakyatku.com. (2018, April 18). KPU Makassar Tetapkan DPT, Ini Jumlahnya. Retrieved from <https://rakyatku.com/read/97358/kpu-makassar-tetapkan-dpt-ini-jumlahnya>
- Situmorang, W. A. (2007). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Suara.com. (2015, July 27). Ini Daftar 269 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2015. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2015/07/27/104027/ini-daftar-269-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2015>
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang, Indonesia: Intrans Publishing.

- TRIBUNnews.com. (2018a, February 7). PAW Andi Rachmatika Dewi Bersoal, Ini Mekanisme Menurut KPU Sulsel. Retrieved from <https://makassar.tribunnews.com/2018/02/07/paw-andi-rachmatika-dewi-bersoal-ini-mekanisme-menurut-kpu-sulsel?page=all>
- TRIBUNnews.com. (2018b, March 21). Inilah Pasal Penyebab Danny-Indira Didiskualifikasi PT TUN, Petahana ini Juga Pernah Merasakannya. Retrieved from <https://makassar.tribunnews.com/2018/03/21/inilah-pasal-penyebab-danny-indira-didiskualifikasi-pt-tun-petahana-ini-juga-pernah-merasakannya>
- Widyasari, A., Dewi, R. A., & Rengganis, V. M. S. (2019). Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 89-119. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48307>

Tentang Penulis

1. **Hariato**, memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. E-Mail: hariato18001@mail.unpad.ac.id
2. **Wawan Budi Darmawan**, memperoleh gelar Doktor Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hubungan Internasional dan Ketua Program Studi Pascasarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. E-Mail: wawan.budi.darmawan@unpad.ac.id
3. **Muradi**, memperoleh gelar Doktor dari Flinders University, Adelaide, Australia, pada tahun 2012. Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik dan Ilmu Keamanan pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. E-Mail: muradi@unpad.ac.id